

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di KOPERASI
SYARI'AH AL MADINAH Purwodadi Grobogan)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana
S-1 Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
AZIZ TAUFIK AFIYANTO
C 100 040 053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas dalam UU No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi berdasarkan pada asas kekeluargaan.¹

Begitu besar peranannya dan harapan yang diemban dan dibebankan kepada koperasi, maka wajar bila pembangunan perkoperasian diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberikan manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat perlu jaminan. Hal ini, dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka debitur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan adalah pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim.¹ Sedang mengenai apa yang dapat dituntut² ditentukan oleh pasal 1267 KUHPerdara. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggungjawabnya.

Adapun sifat hukum dari fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat *accessoir* (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang. Pada fidusia, sebagai jaminan karena kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya.

¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1266

² Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1267

Pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara Belanda yang tidak diatur dalam KUHPerdota. Jaminan fidusia ini merupakan perkembangan dari kebutuhan kredit dari masyarakat yang tidak tertampung pada lembaga jaminan yang ada pada waktu itu yaitu gadai dan hipotek (sekarang hak tanggungan). Karena pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia yang berdasarkan yurisprudensi dirasa kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia. Dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal 5 UU no. 42 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui perjanjian dengan jaminan fidusia lebih lanjut, penulis mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di KOPERASI SYARIAH AL MADINAH Purwodadi Grobogan)”**.

B. Pembatasan Masalah

Keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya, dan tenaga tidak memungkinkan penulis menjelaskan semuanya, maka perlu kiranya ditentukan batasan dan ruang lingkup yang akan diteliti, agar sesuai dengan arah dan tujuan penulisannya yaitu tentang pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang berupa BPKB Mobil di Koperasi Syariah “Al Madinah” Purwodadi Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Maka dapat dirumuskan suatu masalah yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di koperasi syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?
2. Hambatan apa yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di koperasi syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?
3. Bagaimana cara penyelesaian dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta hambatan dan cara penyelesaian yang ada pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di koperasi syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang hukum jaminan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1 Objek Penelitian

Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia (Studi kasus di KOPERASI SYARIAH AL MADINAH Purwodadi Grobogan)

2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³

3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan secara kenyataan dalam praktek.⁴

4 Bahan atau Materi Penelitian

Adapun bahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

³ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Hal 23

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hal 67

1. KUHPerdata
2. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
3. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi buku-buku atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian. Hukum jaminan terutama fidusia dan karangan sarjana terkemuka dalam bentuk buku tesk ilmiah maupun artikel-artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

d. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data pokok berupa data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Koperasi Syariah “Al Madinah” Purwodadi Grobogan.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh orang diluar penulis sebagai keterangan pendukung dan penunjang kelengkapan data primer, meliputi perundang-undangan, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku yang membahas masalah hukum.

e. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan diupayakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dari literature dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan baik secara langsung dan tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

2. Penelitian Lapangan

a. Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. Tipe wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

b. Pengamatan (observasi)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

f. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik

secara lisan maupun tertulis dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka pencapaian tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3. Macam-Macam Perjanjian
 - 4. Asas-Asas Perjanjian
 - 5. Hapusnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

⁵ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, Hal 250

1. Dasar Hukum Perkreditan di Indonesia
2. Jenis-Jenis Kredit
3. Pengertian Perjanjian Kredit
4. Syarat sahnya Perkreditan
5. Hapusnya Perjanjian Kredit

C. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia
2. Sifat Fidusia
3. Sifat Jaminan Fidusia
4. Bentuk Jaminan Fidusia

D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi
2. Dasar Hukum Koperasi
3. Prinsip Koperasi
4. Jenis Koperasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?
2. Hambatan apa yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?
3. Bagaimana cara penyelesaian dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di Koperasi Syariah Al Madinah Purwodadi Grobogan?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA